

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia dan menjadi salah satu pembahasan utama dari 17 Tujuan Pembangunan Global (TGP) dan menjadi agenda penting bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mencakup berbagai pihak baik pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kemiskinan menjadi permasalahan multidimensional yang membutuhkan berbagai upaya untuk menanggulangnya. Di Indonesia masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan klasik yang terus terjadi. Berbagai kebijakan dan program telah diterapkan untuk mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, namun hingga kini masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan yang serius. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut (Christianto, 2013).

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi sosial-ekonomi yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat di mana hak-hak dasar mereka untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan bermartabat tidak terpenuhi. Hak-hak dasar tersebut mencakup kebutuhan primer seperti pangan, layanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, tempat tinggal layak, akses air bersih, tanah, sumber daya alam, lingkungan sehat, rasa aman dari kekerasan atau ancaman, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Kondisi kemiskinan ini juga mencakup pekerjaan yang penghasilannya tidak memadai untuk

memenuhi kebutuhan pokok, yang secara umum digambarkan sebagai ketidakmampuan pendapatan rendah dalam menyediakan keperluan esensial (Ramadhan dkk, 2017).

Menurut Supriatna (1997:90), kemiskinan merupakan kondisi keterbatasan menyeluruh yang dialami seseorang bukan karena kehendak probadinya sendiri. Seorang penduduk dikategorikan miskin apabila ditandai dengan rendahnya pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, status kesehatan dan gizi, serta tingkat kesejahteraan secara keseluruhan, yang semuanya mencerminkan siklus ketidakberdayaan berkelanjutan. Faktor penyebab kemiskinan ini sering kali berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, yang akhirnya berdampak pada minimnya pengetahuan dan keterampilan informal.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang dituangkan ke dalam konstitusi negara yaitu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Dimana dalam pasal ini menyatakan bahwa negara berdasarkan dengan konstitusi bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar guna mendapatkan penghidupan yang layak. Penanganan fakir miskin ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Menurut *World Bank*, penduduk yang kemampuannya memenuhi kebutuhan harian tidak melebihi USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) dikategorikan sebagai miskin ekstrem. Badan Pusat Statistik (2021) mendefinisikan seseorang termasuk dalam kelompok kemiskinan ekstrem jika pengeluaran harian per orang di bawah Rp 10.739 atau setara Rp 322.170 per bulan. Upaya penanganan kemiskinan menjadi fokus utama pemerintah guna mewujudkan masyarakat yang makmur dan mandiri secara ekonomi. Di Indonesia, masalah kemiskinan telah berkembang ke tingkat yang lebih parah, yaitu kemiskinan ekstrem, dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan sebanyak 5,59 juta jiwa (2,04%) dari total penduduk tergolong dalam kategori tersebut.

Bank Dunia (1990) dalam laporannya di hadapan anggota PBB bertitel *"Poverty and Human Development"* mengatakan bahwa: *"The case for human developemnt is not only or even primarily an economic one. Less hunger, fewer child death, and better change of primary education are almost universally accepted as important ends in themselves"* (pembangunan manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi yang lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna meningkatkan kehidupan sosial ekonominya).

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam kerangka Program Pengembangan Kecamatan (PPK), kriteria penduduk miskin ditentukan minimal dengan memenuhi enam indikator utama sebagai berikut: (1) kondisi rumah layak huni, baik yang dimiliki sendiri maupun bukan milik

sendiri; (2) ketersediaan akses air bersih dan fasilitas sanitasi; (3) tingkat pendapatan atau setara pengeluaran; (4) kepemilikan asset produktif; (5) frekuensi dan kualitas konsumsi makanan (minimal lebih dari dua kali sehari dengan gizi memadai); serta (6) kemampuan membeli setidaknya satu stel pakaian baru dalam setahun. Keluarga yang mencapai skor tiga atau lebih dari keenam kriteria tersebut secara otomatis diklasifikasikan sebagai kelompok miskin.

Sharp dkk. (dalam Kuncoro, 1997:131) menguraikan faktor-faktor penyebab kemiskinan dari perspektif ekonomi. Pada tingkat mikro, kemiskinan timbul akibat ketidakmerataan penguasaan sumber daya yang menghasilkan distribusi pendapatan tidak seimbang, di mana kelompok miskin hanya mengandalkan sumber daya terbatas dengan kualitas rendah. Selanjutnya, kemiskinan juga disebabkan oleh disparitas dan upah, akibat minimnya pendidikan, diskriminasi, atau faktor keturunan. Ketiga, ketidaksetaraan akses terhadap modal turut memperburuk kondisi tersebut, yang semuanya mengarah pada teori lingkaran kemiskinan.

Di Indonesia konsep kemiskinan secara umum mengacu pada pendekatan “*basic needs*”, yaitu ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan berdasarkan standar garis kemiskinan. Individu dikategorikan sebagai penduduk miskin ketika total pengeluaram per kapita per bulannya berada di bawah batas garis kemiskinan yang ditetapkan tahunan oleh pihak otoritas daerah terkait. Fenomena kemiskinan tersebar luas di hampir seluruh provinsi di Indonesia,

termasuk Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan angka kemiskinan relatif tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Data berikut ini menggambarkan persentase kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi di Indonesia.

Tabel 1.1

Angka Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi di Indonesia

Provinsi	Jumlah	Persentase
Jawa Barat	941.860	37%
Jawa Tengah	581.968	23%
Jawa Timur	508.571	20%
Nusa Tenggara Timur	212.672	8%
Papua	196.120	8%
Maluku	97.747	4%
Papua Barat	39.357	2%
Jumlah	2.578.295	

Sumber: BPS 2023 dalam Ramadhani (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menjadi fokus utama penanganan kemiskinan ekstrem dengan jumlah 581.968 jiwa. Kemiskinan ekstrem menjadi tantangan pembangunan yang mendesak di Provinsi Jawa Tengah khususnya wilayah pedesaan. Pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan berbagai program dan kebijakan guna menekan angka kemiskinan, mencakup penyaluran bantuan langsung, penguatan masyarakat, serta pembangunan sarana infrastruktur esensial. Namun, hingga saat ini, persoalan kemiskinan masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan penanganan lintas sektoral.

Sementara itu, analisis terhadap faktor-faktor penyebab kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh terbatasnya akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Berdasarkan artikel

milik Ferian dan Edy (2020) menyarankan bahwa penanggulangan kemiskinan harus memperhatikan akar permasalahan secara komprehensif. Dalam konteks lokal, seperti di Kabupaten Ciamis, peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan menjadi sangat strategis. Seperti ditulis dalam artikel Helina dan Komariah (2017), kebijakan yang diarahkan secara spesifik pada karakteristik wilayah dapat meningkatkan efektivitas intervensi.

Pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan juga ditegaskan dalam artikel milik Satterthwaite dan Brown (2013). Pemerintah daerah memiliki posisi yang unik karena berada paling dekat dengan masyarakat dan memahami dinamika lokal secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kewenangan pemerintah daerah merupakan kunci untuk mempercepat pencapaian target pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Beberapa kabupaten di Jawa Tengah menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi jika diuraikan lebih lanjut, sebagaimana tercermin dalam data berikut mengenai kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.2

Data Jumlah Kemiskinan di Jawa Tengah per Kabupaten Tahun 2021 - 2023

Kabupaten / Kota	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (persen)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kabupaten Kebumen	390.599,00	416.004,00	451.678,00	212,92	196,16	195,45	17,83	16,41	16,34
Kabupaten Wonosobo	373.474,00	399.180,00	425.105,00	139,67	128,11	123,7	17,67	16,17	15,58
Kabupaten Brebes	445.853,00	472.326,00	513.339,00	314,95	290,66	286,14	17,43	16,05	15,78

Kabupaten / Kota	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (persen)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kabupaten Pemalang	401.857,00	429.549,00	467.204,00	215,08	195,84	195,57	16,56	15,06	15,03
Kabupaten Purbalingga	384.183,00	407.849,00	439.208,00	153,08	145,33	143,41	16,24	15,3	14,99
Kabupaten Banjarnegara	328.679,00	351.333,00	380.046,00	150,19	141,25	138,99	16,23	15,2	14,9
Kabupaten Rembang	414.977,00	441.482,00	477.514,00	101,4	94,56	91,97	15,8	14,65	14,17
Kabupaten Sragen	363.349,00	389.265,00	426.482,00	122,91	115,14	114,62	13,83	12,94	12,87
Kabupaten Banyumas	417.086,00	441.520,00	479.027,00	232,91	220,47	216,5	13,66	12,84	12,53
Kabupaten Klaten	436.896,00	458.872,00	488.102,00	158,23	144,87	144,43	13,49	12,33	12,28
Kabupaten Demak	445.176,00	471.818,00	511.145,00	151,74	143,01	143,26	12,92	12,09	12,01
Kabupaten Grobogan	404.456,00	428.597,00	464.614,00	175,72	163,2	162,52	12,74	11,8	11,72
Kabupaten Purworejo	376.127,00	393.731,00	427.622,00	88,8	82,64	81,28	12,4	11,53	11,33
Kabupaten Blora	363.649,00	390.478,00	425.135,00	107,05	99,83	99,61	12,39	11,53	11,49
Kabupaten Magelang	353.608,00	377.497,00	411.129,00	154,91	145,33	144,49	11,91	11,09	10,96
Kabupaten Cilacap	363.367,00	384.955,00	419.429,00	201,71	190,96	191	11,67	11,02	10,99
Kabupaten Wonogiri	356.728,00	376.763,00	414.901,00	110,46	105,19	104,82	11,55	10,99	10,94
Kabupaten Karanganyar	401.542,00	424.677,00	465.703,00	95,41	88,56	88,64	10,68	9,85	9,79
Kabupaten Boyolali	361.922,00	383.030,00	420.339,00	104,82	97,18	97,48	10,62	9,82	9,81
Kabupaten Pekalongan	416.779,00	441.765,00	480.934,00	95,26	87,53	87,93	10,57	9,67	9,67
Kabupaten Kendal	407.387,00	433.864,00	465.936,00	100	93,03	92,64	10,24	9,48	9,39
Kabupaten Pati	458.616,00	486.855,00	532.545,00	128,74	118,04	118,18	10,21	9,33	9,31
Kabupaten Temanggung	336.034,00	354.012,00	388.369,00	79,09	73,04	72,96	10,17	9,33	9,26

Kabupaten / Kota	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (persen)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	318.330,00	341.252,00	378.858,00	74,91	69,94	69,97	9,68	8,98	8,92
Kota Surakarta	511.216,00	538.441,00	600.953,00	48,78	45,94	43,89	9,4	8,84	8,44
Kabupaten Tegal	404.655,00	434.638,00	470.728,00	123,52	113,62	105,03	8,6	7,9	7,3
Kabupaten Sukoharjo	410.273,00	434.318,00	476.675,00	73,84	68,72	68,79	8,23	7,61	7,58
Kota Tegal	523.413,00	565.826,00	623.617,00	20,27	19,78	19,22	8,12	7,91	7,68
Kabupaten Semarang	416.395,00	459.151,00	498.952,00	83,61	78,6	78,35	7,82	7,27	7,17
Kota Magelang	537.783,00	575.130,00	602.794,00	9,44	8,65	7,45	7,75	7,1	6,11
Kabupaten Kudus	450.992,00	482.806,00	520.830,00	67,06	66,06	65,16	7,6	7,41	7,24
Kota Pekalongan	480.415,00	513.243,00	565.998,00	23,49	21,81	21,36	7,59	7	6,81
Kabupaten Jepara	419.028,00	442.618,00	479.131,00	95,22	89,08	86,75	7,44	6,88	6,61
Kota Salatiga	480.903,00	518.815,00	565.031,00	10,14	9,45	9,41	5,14	4,73	4,66
Kota Semarang	543.929,00	589.598,00	642.456,00	84,45	79,87	80,53	4,56	4,25	4,23
PROVINSI JAWA TENGAH	409.193,00	438.833,00	477.580,00	4109,75	3831,44	3791,5	11,79	10,93	10,77

Sumber: Data BPS

Ditinjau dari tabel 1.2 diketahui angka kemiskinan di Jawa Tengah sangat tinggi dimana beberapa kabupaten di Jawa Tengah memiliki jumlah persentase kemiskinan tinggi. Salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi adalah Kabupaten Rembang yang berada pada peringkat 7 Kabupaten dengan persentase kemiskinan tinggi di Jawa Tengah. Jika ditinjau berdasarkan dengan data kemiskinan di eks karesidenan Pati, Kabupaten Rembang berada

diperingkat pertama. Berikut data tingkat kemiskinan di daerah eks karesidenan Pati.

Tabel 1.3

Data Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pati Tahun 2021-2025

Kabupaten / Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Rembang	15,8	14,65	14,17	14,02	13,01
Kabupaten Grobogan	12,74	11,8	11,72	11,43	10,63
Kabupaten Blora	12,39	11,53	11,49	11,42	10,58
Kabupaten Pati	10,21	9,33	9,31	9,17	8,24
Kabupaten Kudus	7,6	7,41	7,24	7,23	6,59
Kabupaten Jepara	7,44	6,88	6,61	6,09	5,79

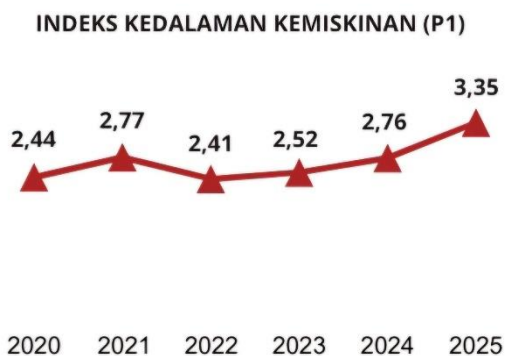
Sumber: Data BPS 2025

Berdasarkan data dari BPS (2025) persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang pada Maret 2025 sebesar 13,01%, menurun 1,01% dari Maret 2024. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Rembang pada Maret 2025 sebesar 85,32 ribu orang, menurun 6,13 ribu orang terhadap Maret 2024. Persentase kemiskinan di Kabupaten Rembang menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun namun masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di eks Karesidenan Pati.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dari 2,76 pada Maret 2024 menjadi 3,35 pada Maret 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dibandingkan periode sebelumnya. Berikut gambar grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).

Gambar 1.1

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



Sumber: BPS Kabupaten Rembang (2025)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2024 hingga Maret 2025 baik dari 0,84 menjadi 1,07. Kondisi ini mencerminkan adanya pelebaran ketidakmerataan pengeluaran bagi masyarakat miskin di Maret 2025 dibandingkan periode Maret 2024.

Gambar 1.2

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)



Sumber: BPS Kabupaten Rembang (2025)

Kabupaten Rembang sendiri menjadi salah satu dari 212 Kabupaten/ Kota prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan Keputusan Menteri

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/ Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi dimana seseorang hidup dengan pengeluaran kurang dari USD 1,90 per hari atau sekitar Rp 11.941 per hari dan Rp 358.000 per bulan. Kondisi ini bukan hanya menunjukkan rendahnya daya beli, tetapi juga ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, tempat tinggal layak, hingga pendidikan. BPS mencatat angka kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2025 berada di angka 0,85% atau 2,38 juta jiwa.

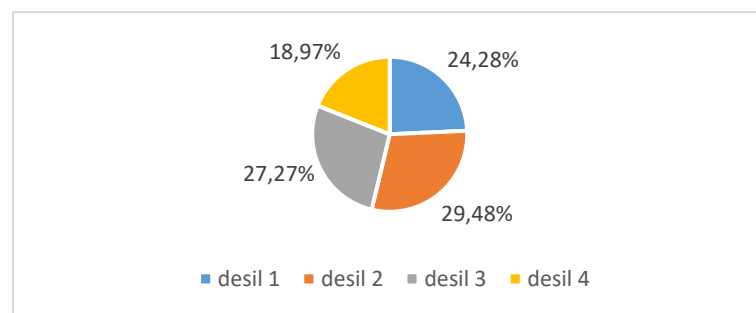
Kemiskinan ekstrem menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang paling mendesak dan kompleks. Kondisi ini bukan hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pangan, air bersih, pendidikan, dan perumahan yang layak. Pemerintah, sebagai aktor utama dalam pembangunan, memiliki peran sentral dalam mengarahkan kebijakan dan program untuk mengatasi kemiskinan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Kemiskinan di Kabupaten Rembang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendapatan atau pengeluaran per kapita ke dalam sepuluh kelompok (desil). Adapun kelompok yang masuk dalam kategori miskin berada di desil 1 sampai 5, sedangkan desil 6 sampai 10 merupakan kelompok dengan kategori mampu hingga kaya. Dalam konteks kemiskinan, desil 1 hingga desil 3 digunakan untuk menggambarkan penduduk miskin atau rentan miskin, karena berada di bagian

bawah distribusi pendapatan. Ditinjau dari pengelompokan (desil) ini, masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem berada di desil 1. Berikut adalah data persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang.

Gambar 1.3

Persentase Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Rembang Tahun 2024



Sumber: Bappeda Kabupaten Rembang

Dari diagram di atas, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang sebesar 24,28% dari jumlah keseluruhan masyarakat miskin di Kabupaten Rembang. Persentase ini menunjukkan angka yang cukup tinggi karena sekitar 77.496 jiwa hidup dalam kondisi miskin ekstrem dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan data antar jenjang pemerintahan dari kabupaten, provinsi, hingga pusat. Masalah ini bukan sekadar administratif. Ketidakterbaruan dan inkonsistensi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyebabkan penyaluran bantuan sosial rentan tidak tepat sasaran (Yandip, 2025).

Ketidakakuratan dan ketidaksinkronan data DTKS/ RTLH di awal 2025 menjadi hambatan utama dalam menjamin bantuan sosial yang tepat sasaran (Furqon, 2025). Pemerintah Kabupaten Rembang menekankan pentingnya beberapa hal sebagai berikut untuk mengatasi tantangan tersebut:

1. Pemutakhiran data berkala
2. Validasi lintas OPD
3. Implementasi sistem data terpadu

Efektivitas penanggulangan kemiskinan masih terbatas karena koordinasi antar OPD dan *stakeholder* terkait masih belum optimal. Forum koordinasi yang telah digelar belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan di tingkat mikro dan administratif desa. Di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Rembang menargetkan 15 desa prioritas untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem berdasarkan SK Bupati dan data awal DTKS. Intervensi seperti bedah rumah, peningkatan sanitasi, air bersih, dan pelatihan keterampilan telah dilakukan, tetapi dampaknya masih belum optimal (Bappeda, 2025).

Menurut Yandip (2025) target ambisius Pemerintah Kabupaten Rembang seperti renovasi 6.000 RTLH sepanjang 2023–2024 juga terhambat oleh data penerima yang belum valid. Distribusi bantuan terlambat dan tidak merata, menyebabkan desa-desa prioritas belum menerima manfaat optimal. Pemerintah Kabupaten Rembang juga mengalokasikan dana sekitar Rp 239,4 miliar hingga triwulan III 2024 untuk program kemiskinan ekstrem, tersebar di berbagai OPD. Dana Desa tahun 2024 juga mencapai Rp 243 miliar, dengan 25% diwajibkan untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan 20%

untuk ketahanan pangan. Namun alokasi anggaran ini belum mampu digunakan secara efektif untuk menanggulangi kemiskinan yang dibuktikan dengan keterlambatan pencairan dana bantuan, data penerima belum valid, dan sumber anggaran yang belum terintegrasi (Bappeda, 2025).

Menurut laporan dari DINSOSPPKB Kabupaten Rembang bantuan sosial seperti BPJS mandiri, BLT, dan RTLH terlambat dicairkan atau bahkan tidak sampai kepada penerima yang berhak. Meski DINSOSPPKB Kabupaten Rembang telah membuka layanan di Mal Pelayanan Publik, layanan tersebut hanya bersifat administratif dan tidak menjamin proses verifikasi dan bantuan langsung berjalan lebih cepat atau akurat. Terdapat keluhan bahwa DINSOSPPKB Kabupaten Rembang tidak memiliki wewenang penuh untuk memperbarui data DTKS; hal tersebut masih menjadi domain Bappeda atau Kemensos. Akibatnya, meskipun DINSOSPPKB Kabupaten Rembang telah mengidentifikasi warga miskin ekstrem melalui verifikasi rutin, tindakan lanjutan seperti penyaluran bantuan sering terhambat administrasi dan koordinasi lintas OPD.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk diteliti terkait dengan bagaimana peran pemerintah Kabupaten Rembang dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Kabupaten Rembang dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pemerintah melalui dinas terkait masih kurang optimal dalam menyediakan data angka kemiskinan ekstrem sehingga data angka kemiskinan ekstrem belum akurat dan belum terbaharui secara regular yang mengakibatkan sulit untuk dilakukan pemetaan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem secara akurat
2. Pemerintah Kabupaten Rembang belum mampu menjadi perencana dan fasilitator Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) sehingga Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) masih belum tepat sasaran
3. Peran pemerintah sebagai Dinamisator belum optimal yang berdampak pada koordinasi antar lembaga dan *stakeholder* terkait yang kurang sinergis serta intervensi terhadap desa prioritas yang belum optimal
4. Pengelolaan anggaran yang masih inefisien dan belum optimal dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE)

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Rembang dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE)?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung peran pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Kabupaten Rembang?

1.4 Tujuan

1. Menganalisis peran pemerintah Kabupaten Rembang dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE)
2. Menganalisis faktor penghambat dan pendukung peran pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Kabupaten Rembang

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan dapat menganalisis peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem serta memperkaya kajian koordinasi birokrasi lokal guna menekan kemiskinan ekstrem.

1.5.2 Manfaat secara Praktis

Secara praktis penelitian ini mampu menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam penanganan kemiskinan ekstrem serta untuk mengetahui bahwa kemiskinan disebabkan oleh berbagai macam faktor dan menjadi suatu masalah multidimensional karena berkaitan dengan banyak aspek baik ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan referensi guna menambah wawasan serta membentuk perbandingan antara penelitian saat ini dan riset sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan rujukan kajian teoritis yang berkaitan dengan penyebab kemiskinan ekstrem, peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan serta faktor-faktor pendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem. Adapun artikel-artikel dari riset terdahulu yang dijadikan rujukan pada penelitian ini meliputi.

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Landasan Teori	Metode	Hasil	Keterkaitan dengan Penelitian
1	Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Medan	Amelia, dkk (2025)	Teori Peran Pemerintah (Fasilitator dan Peran Pembangunan)	Studi literatur	Artikel ini membahas tentang peran pemerintah kota Medan dalam mengimplementasikan berbagai program sosial, pelayanan, layanan pendidikan, layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur sebagai strategi penanggulangan kemiskinan.	Teori yang digunakan dalam penelitian Amelia, dkk relevan dengan penelitian ini
2	Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan: Evaluasi Dari	Purba, dkk (2025)	Teori Peran Pemerintah	Studi pustaka	Daya beli dan akses layanan dasar dipengaruhi oleh adanya bantuan sosial namun kurangnya	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purba, dkk (2025)

No	Judul Penelitian	Peneliti	Landasan Teori	Metode	Hasil	Keterkaitan dengan Penelitian
	Berbagai Penelitian				transparansi, ketergantungan masyarakat dan ketidaktepatan bantuan sosial berdampak pada efektivitas program pemerintah. Diperlukan adanya koordinasi dan perbaikan dalam sistem pendataan serta transparansi untuk mengoptimalkan program pemerintah	dapat dijadikan sebagai pembanding dan data sekunder dalam penelitian ini.
3	<i>Collaborative Governance</i> dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang	Ramadhani, dkk (2024)	<i>Collaborative Governance</i>	Deskriptif kualitatif, <i>purposive</i> dan <i>snowball sampling</i>	Pengentasan masalah kemiskinan di Desa Ngemplakrejo, kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang dimulai sejak dikeluarkannya SK Bupati Kabupaten Rembang dimana pihak-pihak yang terlibat yaitu masyarakat, pemerintah Kabupaten Rembang melalui dinas terkait, dan Bank Jateng. Proses kolaborasi ini dipengaruhi	Hasil penelitian Ramadhani, dkk (2024) dapat dijadikan referensi untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Rembang dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem

No	Judul Penelitian	Peneliti	Landasan Teori	Metode	Hasil	Keterkaitan dengan Penelitian
					oleh berbagai faktor seperti faktor kultural, komunikasi, partisipasi, dan sebagainya.	
4	<i>Emergent Poverty Traps and Inequality at Multiple Levels Impedes Social Mobility</i>	Dupont & Debraj Roy (2024)	<i>Trappoverty Multilevel</i> , Interaksi Mekanisme Individual dan Institusional	Eksperimental dengan pendekatan <i>agent-based modeling</i> dan dinamikan sistem	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>poverty traps multilevel</i> diakibatkan oleh interaksi kompleks antara karakter individu dan institusi.	Hasil riset yang dilaksanakan oleh Dupont dan Debraj (2024) dapat dijadikan sebagai referensi terkait dengan penyebab kemiskinan
5	Peran Pemerintah Kabupaten dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep	Fernanda, dkk (2023)	Teori Peran Pemerintah	Kualitatif deskriptif	Pemerintah memiliki tiga peran yaitu sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menjalankan perannya dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini akan tetapi angka dispensasi nikah hanya mengalami sedikit penurunan.	Teori dalam penelitian Fernandan dkk (2023) dapat dijadikan referensi teori untuk penelitian ini
6	Peranan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan	Arsjad, dkk (2022)	Peran Struktural Pemerintah	Kualitatif	Pemerintah desa sebagai aktor utama dalam menanggulangi kemiskinan	Teori dan metode dalam penelitian Arsjad

No	Judul Penelitian	Peneliti	Landasan Teori	Metode	Hasil	Keterkaitan dengan Penelitian
	di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa				dimana pemerintah desa memiliki fungsi-fungsi seperti pemberdayaan, kelembagaan, dan pemanfaatan sumber daya lokal.	(2022) dapat dijadikan referensi dan pembanding teori dalam penelitian ini
7	Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran di Indonesia	Sanjaya, dkk (2022)	Teori Peran Pemerintah	Kualitatif dengan data sekunder	Pemerintah memiliki peran yang vital dalam menangani masalah sosial termasuk kemiskinan dengan pendekatan konseptual yang memasukkan aspek moral, sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi.	Teori dan metode dalam penelitian Sanjaya (2022) dapat dijadikan referensi dan pembanding teori dalam penelitian ini
8	Peran Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan	Harefa (2022)	Teori peran pemerintah dan ekonomi publik	Kualitatif dokumentasi	Pemerintah Kota Medan telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Nelayan Indah sesuai dengan Perda Kota Medan. Wujud implementasinya yaitu penyaluran bantuan Kesehatan, pangan, pendidikan, modal usaha,	Hasil penelitian yang dilakukan oleh harefa dapat dijadikan referensi dan acuan terkait dengan peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

No	Judul Penelitian	Peneliti	Landasan Teori	Metode	Hasil	Keterkaitan dengan Penelitian
					pangan, dan lain-lain.	
9	Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia	Wulandari, dkk (2022)	Teori Peran Pemerintah	Kualitatif deskriptif	Pemerintah telah melaksanakan beberapa program anti kemiskinan	Teori dalam penelitian Sanjaya (2022) dapat dijadikan referensi dan pembandingan teori dalam penelitian ini
10	Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan dan Bagaimana Penanggulangannya: Studi Empiris Pada 29 Kabupaten di Jawa Tengah	Ferian & Edy (2021)	Teori pertumbuhan ekonomi, teori ketergantungan, dan <i>Human Capital</i>	Regresi berganda berbasis data panel	Hasil analisis menunjukkan pengaruh signifikan dari <i>agrishare</i> , <i>industrishare</i> , dan produktivitas buruh, dan alokasi dana desa terhadap kemiskinan, berbeda dengan pengangguran serta rasio ketergantungan yang tidak berpengaruh nyata.	Model penelitian dari Ferian dan Edy (2021) dapat dijadikan acuan untuk mengetahui penyebab kemiskinan, peran pemerintah dalam penanggulan kemiskinan, serta faktor-faktor penentunya
11	Peran Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis	Herlina dan Komariah (2017)	Teori Implementasi Kebijakan dan Peran Pemerintah	Pendekatan Yuridis Sosiologis	Pemerintah telah melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan pembentukan pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan Kabupaten Ciamis	Hasil penelitian yang dilakukan Herlina dan Komariah (2017) dapat dijadikan referensi peran pemerintah (regulator)

No	Judul Penelitian	Peneliti	Landasan Teori	Metode	Hasil	Keterkaitan dengan Penelitian
12	<i>The Roles and Responsibilities of Local dan Regional Government in Poverty Reduction and Sustainable Development</i>	Satterthwaite, dkk (2013)	Teori kelembagaan dan teori tata kelola multi-level	Kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan analisis kebijakan	Pemerintah daerah memiliki peran signifikan dalam memenuhi berbagai kebutuhan warganya baik sebagai penyedia utama, regulator, maupun pengelola layanan yang disediakan pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah yang kuat memberikan wewenang kepada daerah dalam menanggulangi permasalahan di daerah seperti kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan sehingga kondisi politik di daerah serta kebijakan yang dikeluarkan akan sangat mempengaruhi stabilitas pembangunan di daerah.	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Satterthwaite, dkk (2013) dapat dijadikan referensi untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengurus daerah dan menanggulangi kemiskinan.
13	Kemiskinan Nelayan: Studi Kasus Penyebab Eksternal dan Upaya Revitalisasi Tradisi Pengentasannya	Humaedi (2012)	Teori konstruksi sosial dan struktural	Metode etnografi dengan analisis deskriptif kualitatif	Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi internal produksi biasanya mampu diatasi oleh program pemerintah sedangkan yang disebabkan oleh	Model penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penyebab kemiskinan di Rembang

No	Judul Penelitian	Peneliti	Landasan Teori	Metode	Hasil	Keterkaitan dengan Penelitian
	di Kaliori, Rembang, Jawa Tengah				kondisi eksternal seperti terjatut utang rentenir muncul bersama dalam kehidupan dan praktik kebudayaan. Kemiskinan eksternal hadir bersama dengan kondisi sistem sosial dan budaya.	
14	<i>Poverty Reduction in Indonesia: Why Pro-Poor Growth Requires more than "Getting Institutions Right."</i>	Thirkell-White, B (2009)	Teori kelembagaan inklusif, teori <i>Pro-Poor Growth</i> , dan teori keseimbangan pertumbuhan dan ketimpangan	Studi kasus	Penanggulangan kemiskinan di Indonesia memiliki berbagai tantangan dimana bukan sekedar bertumpu pada pengelolaan lembaga pemerintah yang baik namun juga dipengaruhi oleh kondisi politik dan manajemen politik yang cermat.	Model penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan
15	<i>Poverty and Development Policy</i>	Vaidyanathan, A (2001)	Teori kelembagaan inklusif	Studi kasus	Dalam mengatasi kemiskinan diperlukan beberapa perhatian khusus seperti diperlukan banyak pengetahuan dan keahlian dalam mengelola sumber daya lokal, pembentukan	Model penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi peran pemerintah dalam pembentukan kebijakan untuk menanggula

No	Judul Penelitian	Peneliti	Landasan Teori	Metode	Hasil	Keterkaitan dengan Penelitian
					lembaga pemerintah daerah yang demokratis, dan peran aktif masyarakat.	ngi kemiskinan

Artikel - artikel di atas merupakan beberapa artikel terkait yang akan digunakan sebagai referensi dan acuan dalam penelitian ini. Ada perbedaan signifikan antara penelitian ini dan riset terdahulu dari berbagai sudut pandang penting. Hingga saat ini penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implementasi dan evaluasi kebijakan penanganan kemiskinan serta efektivitas peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini didasarkan pada pemilihan teori, lokasi studi, tujuan analisis, serta temuan yang diharapkan. Berbeda dari studi-studi terdahulu, penelitian ini menerapkan teori peran pemerintah untuk mengkaji kontribusi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Kabupaten Rembang.

Penelitian ini akan berfokus pada lokus di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dengan pengumpulan data primer dilakukan di instansi terkait, yakni Bappeda Kabupaten Rembang dan DINSOSPPKB Kabupaten Rembang. Lokus penelitian ini dipilih karena Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah di Jawa

Tengah yang masih menghadapi tantangan serius terkait dengan kemiskinan ekstrem sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini. Peran pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan ini sangat penting terutama berkaitan dengan realisasi program-program strategis Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Penelitian ini akan menganalisis peran pemerintah Kabupaten Rembang dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Rembang (PKE) serta faktor penghambat dan pendukung peran pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Karenanya, studi ini diharapkan memberikan ilustrasi faktual komprehensif terkait pendekatan, rintangan, serta hasil dari program Pemerintah Kabupaten Rembang guna menangani kemiskinan ekstrem.

1.7 Teori dan Konsep

1.7.1 Administrasi Publik

Administrasi publik secara etimologi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang bermakna melayani, memenuhi kebutuhan, serta memberikan bantuan. Menurut Chandler dan Plano (1998) dalam Rahman (2017), administrasi publik merupakan proses koordinasi sumber daya serta aparatur negara guna merancang, melaksanakan, mengevaluasi, serta mengelola kebijakan publik secara efektif. Secara konseptual, administrasi publik dapat dipandang sebagai perpaduan seni dan ilmu pengetahuan (*art and science*) yang bertujuan mengelola kebijakan publik untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat maupun organisasi terkait.

Menurut Dwight Waldo dalam *The Administrative State* (1948) Administrasi Publik adalah “*the art and science of management as applied to the affairs of the state*” yaitu suatu perpaduan antara seni dan ilmu dalam manajemen yang diterapkan pada urusan pemerintah. Dwight Waldo menekankan bahwa birokrat memiliki peran penting dalam mengartikulasikan dan menyeimbangkan kebijakan publik dan demokrasi bukan hanya sekedar efektivitas dan efisiensi. Hal ini menandakan bahwa administrasi publik merupakan penyeimbang dan penggerak antara pelayanan publik, politik, hukum serta demokrasi.

Peran administrasi publik sebagai penyeimbang dan penggerak pelayanan publik dan hukum sesuai juga dengan pendapat Willoughby dalam Dimock and Dimock (1986) yang mengatakan bahwa administrasi publik berfungsi untuk mengimplementasikan hukum sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah (Maksudi, 2017). Administrasi publik memegang peranan krusial dalam pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan prinsip demokrasi. Dalam evolusinya, administrasi publik diklasifikasikan ke dalam tiga paradigma utama sebagai berikut.

a. *Old Public Administration (OPA)*

Di dalam paradigma ini Woodrow Wilson mengemukakan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan kebijakan pemerintah dengan profesional, netral, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan (Thoha, 2008).

Namun dalam perkembangannya paradigma ini masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya yaitu birokrasi yang kaku, keterlibatan masyarakat yang minim, kurang adaptif, dan pelayanan yang kurang memadai.

b. *New Public Management (NPM)*

Pada paradigma sebelumnya menggambarkan bahwa organisasi pemerintah (sektor publik) merupakan organisasi yang kaku dan kurang inovatif. Hal ini mengakibatkan pelayanan yang diberikan kurang optimal dan belum mampu memenuhi hak-hak masyarakat. Sehingga muncul paradigma kedua yaitu *New Public Management (NPM)* yang memandang pengguna pelayanan publik adalah *client* yang wajib diberikan pelayanan dengan baik.

c. *New Public Service (NPS)*

Periode selanjutnya dalam perkembangan administrasi publik yaitu *New Public Service (NPS)* dimana dalam paradigma ini melibatkan semua elemen untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Paradigma NPS ini memandang pengguna pelayanan publik sebagai *society* yang berhak mendapatkan pelayanan yang baik. Menurut Thoha (2008) konsep NPS meliputi teori *democratic citizenship*, *civil society*, organisasi *humanism*, dan *postmodern* ilmu administrasi publik.

Menurut Nicholas Henry dalam Keban (2014) terdapat lima paradigma administrasi publik sebagai berikut.

1. Paradigma 1 (1900-1926), yang dikenal sebagai dikotomi politik-administrasi, menekankan pemisahan tegas antara ranah politik dan administrasi, yang tercermin dalam pembagian lembaga legislatif dan eksekutif. Tokoh utama dalam paradigma ini meliputi Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Dampak dari paradigma tersebut adalah pandangan bahwa administrasi bersifat netral nilai dan dapat difokuskan untuk mencapai efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik.
2. Paradigma 2 (1927-1937) yang biasa dikenal sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi. Willoughby dan Gullick & Urwick memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi yang meliputi *Planing, Organizing, Stafing, Directing, Controlling, Reporting, Budgeting*. Lahirnya prinsip-prinsip ini dianggap mampu memberikan dampak positif bagi organisasi pemerintah.
3. Paradigma 3 (1950-1970), yang dikenal sebagai paradigma administrasi negara sebagai cabang ilmu politik, menantang asumsi pemisahan mutlak antara politik dan administrasi. Pada 1946, Morstein-Marx mempertanyakan kemungkinan pemisahan tersebut sebagai hal yang tidak realistis, sementara Herbert Simon mengkritik inkonsistensi prinsip-prinsip administrasi yang tidak bersifat universal. Paradigm aini

menekankan integrasi antara aspek politik dan administrative dalam pengelolaan negara.

4. Paradigma 4 (1956-1970) menggambarkan administrasi publik sebagai disiplin ilmu administrasi yang mandiri. Pada tahap ini, prinsip-prinsip administrasi dikembangkan melalui pendekatan ilmiah yang mendalam dan sistematis. Akibatnya, administrasi publik lebih menekankan pada studi perilaku organisasi, analisis manajemen, pemanfaatan teknologi kontemporer, pendekatan analisis sistem, serta metode kuantitatif dan sejenisnya.
5. Paradigma 5 (1970-sekarang) yaitu paradigma terakhir yang memandang administrasi publik sebagai disiplin yang berpusat pada teori organisasi, teori manajemen, serta kebijakan publik, dengan fokus utama pada isu-isu dan kepentingan publik secara keseluruhan.

Administrasi publik memiliki dua kajian yang sering dibahas yaitu manajemen publik yang berbicara mengenai pengelolaan organisasi sektor publik dan kebijakan publik yang membahas tentang proses perumusan perumusan, implementasi, evaluasi, dan pelayanan publik. Di dalam penelitian ini akan berfokus pada manajemen yang mana berkaitan dengan peran pemerintah Kabupaten Rembang dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

1.7.2 Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan sub-disiplin dari administrasi publik yang mengkaji pengelolaan organisasi sektor publik, sistem penganggaran, pengelolaan sumber daya, peran pemerintah, restrukturisasi struktur organisasi, serta evaluasi kinerja. Konsep manajemen publik bersifat adaptif dan dipengaruhi oleh kondisi serta dinamika lingkungan sekitar agar dapat beroperasi secara optimal.

Secara etimologis, manajemen publik terbentuk dari dua kata kunci, yaitu manajemen dan publik. Stoner (1982:4) mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian terhadap upaya anggota organisasi beserta pemanfaatan semua sumber daya organisasi lainnya untuk meraih sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa manajemen adalah proses yang komprehensif tentang pengelolaan organisasi meliputi penyusunan rencana, pengaturan struktur, pengawasan, dan optimalisasi sumber daya untuk mencapai target organisasi yang ditentukan sebelumnya.

Berkaitan dengan istilah publik Walter Lippmann (1922) berpendapat bahwa publik merupakan sekelompok orang yang menyatukan minat pada masalah tertentu. Mengacu pada kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah publik mengandung sejumlah makna, diantaranya yaitu masyarakat umum, rakyat umum, dan orang banyak.

Berpijak pada pemahaman di atas, dapat dimaknai bahwa istilah publik mengacu pada khalayak ramai atau masyarakat secara keseluruhan.

Di dalam administrasi publik kedua istilah di atas diselaraskan menjadi satu kesatuan cabang administrasi publik yaitu manajemen publik. Menurut Denhardt and Denhardt (2015) manajemen publik merupakan cabang seni dan ilmu dalam mengelola organisasi publik dengan membangun kapasitas, meningkatkan kinerja, dan memajukan kepentingan publik. Menurut Satibi (2012), manajemen publik dapat diartikan sebagai pengelolaan berbagai sektor publik oleh institusi pemerintahan, yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, strategi, serta evaluasi terhadap sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, teknologi, dan beragam sumber daya lainnya, semuanya diarahkan untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya.

Manajemen publik secara umum berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan publik. Mahmudi (2015) menegaskan bahwa manajemen publik berfokus pada pemenuhan sasaran organisasi serta pencapaian visi dan misi secara berkelanjutan dalam jangka waktu panjang. Sementara itu, Islamy (2003) menguraikan karakteristik manajemen publik sebagai berikut.

1. Manajemen publik merupakan sub-sistem dari administrasi publik, mengingat administrasi publik tidak terbatas pada

manajemen pemerintahan dengan turut mencakup elemen politik, sosial, budaya, serta hukum yang memengaruhi dinamika lembaga publik.

2. Manajemen publik melibatkan penerapan fungsi dan proses manajemen yang relevan di sektor publik maupun organisasi non-pemerintah yang tidak berorientasi pada keuntungan finansial.
3. Manajemen publik memosisikan administrasi publik sebagai suatu profesi dan manajernya sebagai praktisi;
4. Manajemen publik menyoroti aktivitas internal pada organisasi pemerintahan serta entitas non-pemerintah yang tidak mengejar profit;
5. Manajemen publik secara tepat menyoroti proses pelaksanaan kebijakan publik oleh institusi pemerintah;
6. Manajemen publik menerapkan fungsi-fungsi pokok seperti penyusunan rencana, pengaturan organisasi, pelaksanaan, serta pengendalian demi mencapai target pelayanan publik.

Menurut George R Terry manajemen publik memiliki 4 fungsi yaitu.

1. *Planning* (Fungsi Perencanaan)

Fungsi ini mencakup penetapan sasaran serta strategi untuk mewujudkannya. Perencanaan berperan sebagai proses fundamental dalam seluruh fungsi manajemen. Ketidaktepatan

perencanaan akan berdampak negatif pada fungsi-fungsi manajemen lainnya.

2. *Organizing* (Fungsi Pengorganisasian)

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan untuk membagi kegiatan dan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Fungsi ini juga berbicara pada proses mengelompokkan orang, tugas, alat, wewenang, dan tanggung jawab sehingga mampu menjadi satu kesatuan dalam mencapai tujuan.

3. *Actuating* (Fungsi Pelaksanaan)

Fungsi *actuating* meliputi pelaksanaan kerja dan tugas yang telah diberikan. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik tidak akan berarti apa-apa jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Diperlukan pengoptimalan sistem kerja, visi, misi, serta program kerja yang efektif. Setiap elemen harus selaras dengan tugas pokok, fungsi, dan kompetensi yang dimiliki masing-masing komponen.

4. *Controlling* (Fungsi Pengendalian).

Fungsi ini meliputi kegiatan dalam menilai suatu kinerja anggota organisasi berdasarkan pada standarisasi pekerjaan yang telah ditentukan. Proses ini dilakukan dengan tujuan supaya pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, sistem, aturan, dan program kerja yang telah ditetapkan.

Menurut Henry Fayol terdapat 5 fungsi manajemen publik yaitu *planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling*.

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Fungsi ini menjelaskan aktivitas apa yang akan dilaksanakan menggunakan sumber daya yang tersedia. Perencanaan bertujuan menetapkan sasaran organisasi secara komprehensif melalui pendekatan optimal serta strategi untuk mewujudkannya.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi *organizing* dilakukan untuk memecah kegiatan besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih terkelola

3. Fungsi Memerintah (*Commanding*)

Fungsi memerintah merupakan fungsi memberi intruksi atau arahan kepada pekerja untuk melaksanakan tugas fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditentukan.

4. Fungsi Pengkoordinasian (*Coordinating*)

Fungsi ini merupakan fungsi untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan supaya tidak keluar dari arah dan perencanaan yang telah ditentukan.

5. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi ini meliputi kegiatan mengawasi aktivitas pekerja yang kemudian dapat dilakukan evaluasi.

Manajemen publik berkaitan dengan hal yang dikerjakan pemerintah dimana pemerintah memiliki peran untuk menyelesaikan permasalahan publik yang mana dalam konteks penelitian ini adalah masalah Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

1.7.3 Teori Perilaku

Teori perilaku yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich, dan Donnelly menjelaskan bahwa perilaku individu di dalam organisasi dihasilkan dari interaksi antara variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis (Gibson et al., 2012). Variabel individu mencakup karakteristik personal seperti motivasi, nilai, kemampuan, dan sikap; sedangkan variabel organisasi meliputi struktur, teknologi, kepemimpinan, sistem penghargaan, serta proses kerja yang memengaruhi pola perilaku pegawai. Di sisi lain, variabel psikologis mencerminkan proses mental internal seperti persepsi, belajar, dan pengambilan keputusan. Kombinasi ketiga variabel ini menentukan bagaimana seorang pegawai memahami tugas, mengeksekusi tanggung jawab, dan merespons lingkungan kerjanya.

Teori perilaku merupakan landasan utama dalam memahami cara individu bertindak, yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia tidak hanya didasarkan pada rasionalitas semata, melainkan juga pada dorongan motivasi, pengalaman, serta interaksi sosial yang membentuk pola tindakan tertentu. Pemahaman ini membuka ruang analisis terhadap

kompleksitas perilaku yang beragam dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks sosial yang lebih luas.

Teori perilaku diperluas dan digunakan dalam manajemen pemerintah atau manajemen publik dimana muncul istilah teori perilaku pemerintah. Teori ini merupakan penerapan teori perilaku dalam ranah institusional dan birokrasi dengan menyesuaikan fokusnya pada perilaku lembaga pemerintah dalam membuat keputusan serta melaksanakan kebijakan publik.

Dalam konteks manajemen publik, teori Gibson memiliki relevansi yang sangat kuat karena sektor publik pada dasarnya adalah organisasi yang sarat dengan dinamika perilaku manusia. Manajemen publik berfokus pada bagaimana organisasi pemerintah dikelola guna meraih tujuan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Perilaku aparatur negara menjadi komponen krusial dalam manajemen publik karena pelaksanaan kebijakan, penyediaan layanan, dan interaksi dengan masyarakat sangat dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, dan sikap pegawai pemerintah. Struktur birokrasi yang cenderung hierarkis dan prosedural juga memengaruhi pola perilaku pegawai, sebagaimana dijelaskan dalam variabel organisasi Gibson. Bila struktur tersebut terlalu kaku, perilaku inovatif, responsif, dan adaptif—yang dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan modern—dapat terhambat. Dengan demikian, pengelolaan perilaku organisasi menjadi bagian integral dalam manajemen publik untuk meningkatkan kinerja birokrasi.

Lebih lanjut, teori perilaku menurut Gibson juga memiliki keterkaitan erat dengan teori peran pemerintah. Peran pemerintah dalam administrasi publik secara umum mencakup fungsi regulatif, pelayanan, fasilitatif, dan pembangunan (Henry, 2017; Dunn, 2018). Efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut sangat ditentukan oleh perilaku aparatur yang menjadi pelaksana kebijakan. Dalam peran regulatif, misalnya, motivasi dan persepsi pegawai terhadap pentingnya penegakan aturan berpengaruh terhadap konsistensi implementasi regulasi. Dalam peran pelayanan publik, perilaku frontliner dalam berinteraksi dengan masyarakat menentukan kualitas layanan yang diterima publik. Bahkan dalam peran fasilitatif dan pembangunan, koordinasi lintas sektor dan kemampuan adaptasi pegawai terhadap perubahan kebijakan memengaruhi keberhasilan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan.

Dengan demikian, teori Gibson memberikan landasan teoritis untuk memahami bagaimana kualitas peran pemerintah sangat bergantung pada variabel-variabel perilaku dalam organisasi publik. Struktur birokrasi, gaya kepemimpinan, sistem penghargaan, serta persepsi dan motivasi aparatur merupakan faktor-faktor yang menentukan apakah pemerintah mampu menjalankan perannya secara optimal. Dalam konteks tersebut, teori perilaku Gibson tidak hanya memberikan penjelasan mengenai penyebab variasi kinerja birokrasi, tetapi juga acuan analitis guna merumuskan strategi peningkatan kapasitas

kelembagaan pemerintah. Maka dari itu, teori ini relevan digunakan sebagai landasan konseptual dalam penelitian mengenai efektivitas peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.

1.7.4 Peran Pemerintah

Manajemen publik tidak dapat berfungsi efektif jika tidak diterapkan dengan optimal. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan manajemen publik. Peran pemerintah menjadi elemen esensial dalam kerangka kenegaraan yang difokuskan untuk membentuk ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah sebagai lembaga publik mendapatkan mandat dari masyarakat untuk mengelola urusan publik mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan regulasi, evaluasi kebijakan, hingga penyediaan layanan publik yang esensial.

Peran pemerintah tidak hanya sekedar tugas administrative semata, melainkan juga wajib adaptif dan inovatif guna merespons dinamika sosial, ekonomi, serta politik yang terus berubah. Secara fundamental, peran pemerintah dapat dilihat sebagai pengatur atau regulator yang mengatur hubungan antarwarga negara serta antara warga dengan negara. Dengan fungsi ini, pemerintah menciptakan sebuah sistem hukum dan kebijakan yang mengarahkan aktivitas masyarakat agar berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga tercipta stabilitas serta ketertiban. Namun, peran pemerintah tidak berhenti pada

pengaturan semata. Pemerintah juga bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan sumber daya dan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang. Dalam hal ini, pemerintah berperan mendukung pemberdayaan komunitas dan mendorong partisipasi aktif warga dalam berbagai program pembangunan, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terjaga dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Dalam kerangka teori pemberdayaan masyarakat, khususnya menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008) peran pemerintah diperluas menjadi lebih inklusif dan kolaboratif. Mereka menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menjadi aktor dominan yang menerapkan kebijakan secara top-down, melainkan harus menjadi mitra yang mendukung dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam merumuskan strategi pembangunan yang sesuai dengan realitas dan prioritas daerah. Dengan kata lain, pemerintah idealnya menjalankan empat peran utama, yaitu sebagai fasilitator yang membuka ruang partisipasi, edukator yang memberikan pelatihan dan informasi, representatif yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan lembaga lain, serta pendamping teknis yang memberikan bimbingan dalam pelaksanaan program.

Peran pemerintah juga sangat penting dalam menjaga keadilan sosial. Dalam banyak kasus, pemerintah wajib menjamin bahwa kebijakan dan program pembangunan dapat diakses oleh seluruh strata masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

Hal ini menjadi pondasi moral dan sosial yang menguatkan legitimasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pemerintah juga bertindak sebagai pengelola sumber daya publik yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan risiko korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

Lebih jauh lagi, peran pemerintah dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menjadi semakin kompleks. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan yang responsif terhadap perubahan global sekaligus mempertahankan nilai-nilai lokal dan budaya yang khas. Hal ini menuntut pemerintah untuk bersikap adaptif, inovatif, dan partisipatif agar dapat memenuhi tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat merupakan kunci utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang berbagai dimensi peran pemerintah sangat penting agar setiap kebijakan dan program dapat dirancang dan dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Menurut Labolo (2010), peran pemerintah dapat dikatakan sebagai fondasi utama dalam mengatur serta mengarahkan kehidupan masyarakat supaya lebih Sejahtera. Peran pemerintah tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi dasar yang mencerminkan keberadaanya sebagai pelayan publik dan penggerak pembangunan. Menurut Labolo (2010) peran pemerintah dibedakan menjadi beberapa fungsi utama yaitu sebagai provider, regulator, dinamisator, dan fasilitator.

1. Peran sebagai provider diartikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik dimana pemerintah menyediakan pelayanan jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasi termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.
2. Peran sebagai regulator yaitu pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. Pemerintah berperan sebagai regulator dengan menetapkan arah pembangunan melalui penerbitan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan keseimbangan dalam penyelenggaraannya. Pemerintah menyediakan pedoman dasar bagi masyarakat sebagai instrument pengaturan terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan.
3. Peran sebagai dinamisator, pemerintah bertindak sebagai motor penggerak dan motivator komunitas untuk terlibat secara dinamis dalam pembangunan tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah

melaksanakan peran ini melalui pemberian bimbingan dan arahan yang intensif serta efektif kepada masyarakat.

4. Peran sebagai fasilitator yang menyediakan sarana pendukung bagi masyarakat. Pemerintah melaksanakan pendampingan melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, pengembangan keterampilan, serta program bantuan berbentuk pendanaan atau penyediaan modal bagi masyarakat.

Peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan menurut Sondang P. Siagian dapat dipahami melalui kerangka umum pemikiran beliau mengenai peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Siagian (2001) menyebutkan bahwa pemerintah memiliki empat peran utama yang sangat relevan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah berperan sebagai regulator dengan menetapkan arah pembangunan guna menciptakan keseimbangan penyelenggaraannya melalui penerbitan berbagai peraturan. Pemerintah bertanggung jawab dalam menetapkan aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Fungsi regulasi ini menjadi dasar dalam menciptakan tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang teratur dan adil.

Pemerintah merancang kebijakan dan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam

beraktivitas. Peraturan ini harus bersifat konsisten, adil, dan berpihak pada kepentingan umum agar dapat menciptakan stabilitas sosial dan mendukung iklim pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah menyediakan pedoman dasar bagi masyarakat sebagai alat pengaturan terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan kebijakan yang mana dalam konteks ini adalah penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE).

2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisor

Peran pemerintah sebagai dinamisor adalah pemerintah mendorong partisipasi warga saat menghadapi kendala pembangunan untuk menjaga vitalitas proses di tingkat lokal, melalui pendampingan yang ketat dan berdampak.

Pemerintah harus berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Menurut Siagian (2001), pembangunan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dorongan, motivasi, dan inspirasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pemerintah bisa menjadi motor penggerak perubahan melalui program-program sosial, pendidikan, dan penyuluhan yang membangkitkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Di dalam ranah penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE), pembinaan dan pengarahannya memiliki signifikansi tinggi, karena diperlukan untuk mempertahankan dinamika lembaga khusus yang mampu memberikan bimbingan kepada masyarakat.

3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Tidak hanya membuat aturan, tetapi juga wajib membantu masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan pembangunan. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan infrastruktur, layanan publik, bantuan teknis, dan kemudahan akses terhadap sumber daya. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai penyedia lingkungan yang kondusif agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang.

Sebagai fasilitator, pemerintah menciptakan iklim yang memperlancar pembangunan dengan menghubungkan berbagai pihak terkait guna mengoptimalkan hasil pembangunan lokal. Pemerintah berupaya membentuk atau menyediakan kondisi yang teratur, nyaman, dan aman, termasuk memfasilitasi sarana serta prasarana pendukung.

4. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berfungsi sebagai pemicu yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan nasional, yang selanjutnya dapat dijadikan modal sosial untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Sebagai katalisator, pemerintah tidak harus menjadi pelaku utama dari setiap

perubahan, tetapi cukup menciptakan kondisi yang memicu atau mempercepat reaksi positif dalam masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui kebijakan strategis, pemberian insentif, atau memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Menurut Siagian (2001), keempat peran ini harus dijalankan secara sinergis dan proporsional agar pemerintah mampu menciptakan tata kelola yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Peran-peran tersebut tidak bersifat statis, melainkan harus terus disesuaikan dengan dinamika sosial dan tantangan global yang dihadapi bangsa.

Pada kondisi faktual, fungsi pemerintah daerah dalam menangani kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang diwujudkan melalui beberapa tugas dan fungsi sesuai regulasi yang berlaku yaitu Keputusan Bupati Rembang Nomor 100.4.2.3/0443/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rembang Tahun 2025. Adapun tugasnya yaitu melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang.

1.7.5 Kemiskinan

Kemiskinan struktural timbul karena kondisi struktur tertentu atau tatanan kehidupan masyarakat yang merugikan (Soetandyo, 1995). Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti ketidakmerataan distribusi sumber daya, akses yang terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan, serta diskriminasi sistemik berkontribusi pada terjebaknya individu atau kelompok dalam kemiskinan. Beberapa poin penting dalam teori ini meliputi:

1. Struktur Ekonomi: Ketidakadilan dalam sistem ekonomi, seperti ketidakmerataan akses terhadap pekerjaan yang layak, menciptakan kondisi di mana sebagian besar populasi terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah.
2. Akses Terbatas: Ketidakmerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan menghambat kemampuan individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Kurangnya pendidikan berkualitas sering menyebabkan keterampilan dan produktivitas yang rendah.
3. Politik dan Kebijakan Publik: Kebijakan yang mendiskriminasi kelompok tertentu atau yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat rentan memperparah kondisi kemiskinan.

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) mengilustrasikan kemiskinan sebagai siklus berkelanjutan yang sulit untuk dipatahkan. Dalam siklus tersebut, berbagai faktor saling

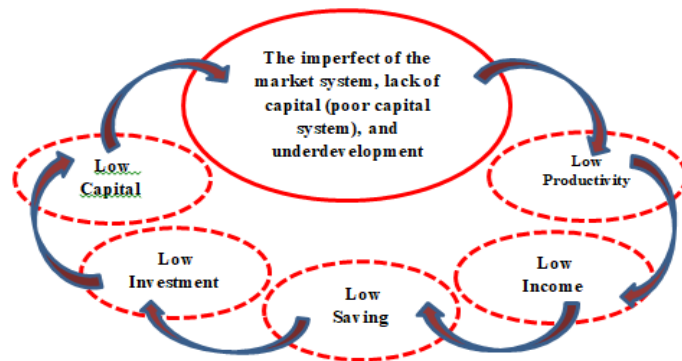
berinteraksi dan saling memperkuat satu sama lain. Contoh elemen dalam lingkaran setan ini meliputi:

1. Kemiskinan Ekonomi: Individu yang berada dalam kondisi kemiskinan kerap kali kekurangan akses terhadap modal, sehingga sulit untuk memulai usaha atau meningkatkan keterampilan.
2. Pendidikan yang Rendah: Rendahnya tingkat pendidikan menghambat peluang memperoleh pekerjaan berkualitas, sehingga pendapatan tetap stagnan pada level rendah.
3. Kesehatan Buruk: Kesehatan yang buruk mengurangi kemampuan individu untuk bekerja dan memproduksi, yang pada gilirannya menghambat upaya keluar dari kemiskinan.
4. Keterasingan Sosial: Komunitas yang terisolasi dan kurang terhubung dengan sumber daya eksternal dapat memperparah situasi kemiskinan, karena kurangnya dukungan sosial dan informasi.

Nurkse (1953) menjelaskan bahwa negara miskin terjebak dalam lingkaran setan karena pendapatan yang rendah menyebabkan tingkat tabungan rendah, sehingga investasi pun terbatas. Hal ini menyebabkan produktivitas tetap rendah dan pendapatan tidak meningkat.

Gambar 1.4

Vicious Circle of Poverty Menurut Ragnar Nurkse



Sumber: ResearchGate

Kedua teori tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa kemiskinan bukan sekadar permasalahan individu, melainkan akibat dari interaksi rumit antara struktur sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Penanganan kemiskinan menuntut pendekatan yang komprehensif dan terpadu, dengan memperhitungkan berbagai faktor yang saling terkait secara dinamis.

1.7.6 Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan bentuk kemiskinan yang paling parah, situasi ketika seseorang atau rumah tangga gagal menyediakan keperluan dasar, termasuk makanan, sanitasi, air bersih, hunian, kesehatan, dan akses pendidikan. Kondisi ini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan ketidakadilan struktural, ketimpangan sosial, dan akses yang terbatas terhadap sumber daya vital.

Menurut Bank Dunia (World Bank), kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi hidup dengan pendapatan kurang dari USD 2,15 per hari (per 2022, disesuaikan dengan paritas daya beli). Angka ini digunakan sebagai standar global untuk mengukur populasi yang hidup dalam kondisi sangat miskin dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup paling mendasar. Namun, kemiskinan ekstrem tidak hanya soal angka. Ekonom dan peraih Nobel, Amartya Sen, memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk menjalani “fungsi dasar” dalam hidupnya, seperti hidup sehat, berpendidikan, dan memiliki partisipasi sosial. Dalam konteks ini, kemiskinan ekstrem berarti keterbatasan total dalam menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

Ciri-ciri kemiskinan ekstrem sangat mencolok dan beragam. Di antaranya adalah kelaparan dan kekurangan gizi kronis, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Penderita kemiskinan ekstrem sering kali tidak memiliki tempat tinggal yang layak, tinggal di lingkungan kumuh,

atau bahkan hidup di jalanan. Mereka juga kekurangan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, sehingga mudah terkena penyakit menular. Di samping itu, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem umumnya tidak menempuh pendidikan formal atau hanya mengikuti pendidikan dasar yang terputus-putus. Ketiadaan jaminan kesehatan juga menjadi ciri utama, yang menyebabkan mereka menghindari pengobatan meskipun dalam kondisi sakit parah. Kehidupan mereka sangat bergantung pada bantuan sosial atau amal, dengan peluang kerja yang sangat terbatas.

Kemiskinan ekstrem memiliki dampak multidimensi. Bagi individu, kemiskinan ekstrem berarti hidup dalam kondisi tidak manusiawi, penuh penderitaan, dan tanpa harapan masa depan. Bagi masyarakat, kondisi ini menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang besar, termasuk tingginya angka kematian, meningkatnya kriminalitas, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Pada skala nasional dan global, kemiskinan ekstrem menjadi penghambat utama pembangunan berkelanjutan.

Penyebab kemiskinan ekstrem sangat kompleks, meliputi faktor struktural seperti ketimpangan distribusi kekayaan, konflik dan perang, bencana alam, keterbatasan pendidikan, serta kebijakan ekonomi yang tidak inklusif. Dalam banyak kasus, kemiskinan ekstrem terjadi di daerah terpencil, konflik, atau wilayah yang minim infrastruktur.

Di Indonesia pengukuran dan penetapan indikator kemiskinan ekstrem diatur melalui beberapa kebijakan nasional, salah satunya yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi rumah tangga dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu setara USD, 1,90 per hari menurut *Purchasing Power Parity* (PPP) atau Rp 11.941 per hari. Nilai tersebut dijadikan ambang batas minimum untuk mengklasifikasikan penduduk miskin ekstrem dari perspektif moneter.

Pemerintah juga menggunakan pendekatan multidimensi atau *Multidimensional Poverty Index* (MPI) yang digunakan secara global serta indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun indikator non-moneter yang digunakan menurut Strategi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Stranas P3KE) yaitu:

1. Akses terhadap kebutuhan dasar
2. Kondisi tempat tinggal
3. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan
4. Sumber penghidupan
5. Ketergantungan dalam rumah tangga

Secara kelembagaan, pengumpulan data kemiskinan ekstrem melibatkan sinergi lintas sektor, termasuk TNP2K, Bappenas, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah melalui Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD). Hal ini dilakukan untuk memastikan validitas data serta ketepatan sasaran intervensi kebijakan sesuai dengan PMK No. 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/ Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024.

Indikator kemiskinan ekstrem di Indonesia bersifat holistik yang menggabungkan pendekatan moneter dan multidimensi yang dirancang untuk menangkap gambaran nyata kondisi masyarakat paling rentan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang lebih tepat, adil, dan humanis dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem menuju target nasional 0% kemiskinan ekstrem.

1.7.7 Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Pemerintah

Kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Indonesia, bahkan di tengah berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Pemerintah memiliki peran yang vital dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui kebijakan sosial, bantuan langsung, hingga program pemberdayaan masyarakat. Di dalam upaya penanggulangan kemiskinan terdapat berbagai faktor penghambat dan pendukung.

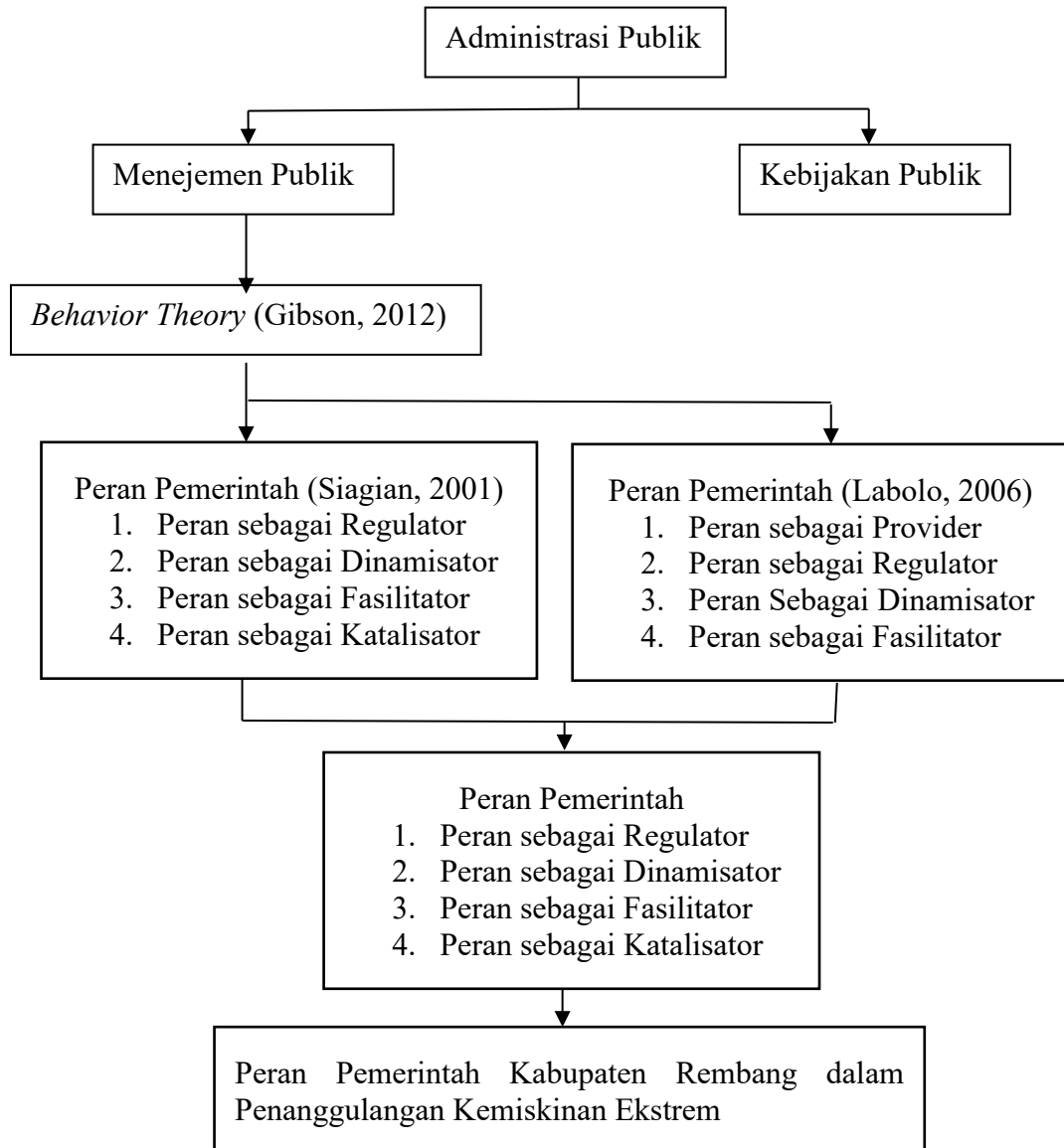
Masalah klasik seperti birokrasi yang lambat, tumpang tindih kebijakan, kurangnya data yang akurat, hingga keterbatasan anggaran sering menjadi problematika. Selain itu, masih banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga program-program bantuan tidak sampai

pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Menurut Siagian (2003) penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak hanya meliputi nilai ekonomi saja namun mencakup pada komitmen sosial politik dari pemerintah yang diwujudkan melalui kebijakan yang berkelanjutan. Menurut Siagian (2007) regulasi harus bersifat *enabling* bukan *restrictive* sehingga mampu mempermudah birokrasi, menjamin harmonisasi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Sebaliknya jika regulasi tanpa landasan yang valid dan tumpang tindih maka akan menimbulkan stagnasi birokrasi.

Jim Ife dalam *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation* (2008) menguraikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suatu sistem yang memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal kesejahteraan, partisipasi, dan kesetaraan. Menurut Ife, salah satu faktor pendukung utama peran pemerintah dalam pembangunan sosial adalah komitmen terhadap prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia (2013).

Peran pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dipengaruhi oleh peran pemerintah itu sendiri yang bertindak sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Keempat peran ini penting untuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan suatu usaha untuk menjabarkan variabel ke dalam indikator-indikator yang dapat diukur atau diamati. Operasionalisasi konsep bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu konsep bersifat abstrak ke dalam fokus yang lebih konkret, sehingga dapat dikaji melalui pengumpulan dan analisis data. Fokus utama penelitian ini yaitu konsep peran, kumpulan ekspektasi masyarakat terhadap perilaku individu berdasarkan posisi sosialnya. Peran menggambarkan aspek aktif dari suatu status; seseorang dianggap memainkan perannya ketika menjalankan hal dan kewajiban sesuai kedudukannya. Peran juga bersifat fleksibel sesuai dengan situasi dan dinamika sosial yang berkembang.

Di dalam lingkup birokrasi, peran ini dijalankan oleh pemerintah dalam tugas-tugas pemerintahan. Pemerintah memiliki fungsi penting sebagai penyedia layanan publik, pembuat kebijakan, sekaligus pengarah dan pendukung dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Adapun dalam konteks penelitian ini, yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem. Penelitian ini mengacu pada teori yang menyebutkan bahwa pemerintah memiliki empat peran utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Keempat peran ini akan diuraikan lebih lanjut ke dalam sub-variabel, yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan instrumen penelitian. Berikut tabel operasionalisasi konsep dalam penelitian ini.

Tabel 1.5
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
Peran Pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur, melayani, membangun, dan memberdayakan masyarakat untuk menciptakan kondisi sosial yang sejahtera dan stabil.	Regulator, pemerintah berperan sebagai pembuat dan penegak regulasi yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik guna menciptakan keselarasan dan keadilan di masyarakat	1. Koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan 2. Koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 4. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha	1. Menentukan program penanggulangan kemiskinan, target dan indikator program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Kabupaten Rembang 2. Menyusun rencana kegiatan, anggaran, pengelolaan data, dan strategi pemberdayaan sosial 3. Kesesuaian regulasi dan pelaksanaan di lapangan 4. Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pembentukan kebijakan
	Dinamisator, pemerintah berperan dalam mendorong, menggerakkan, dan mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan melalui kebijakan dan program yang inovatif	1. Koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan 2. Koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 4. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha	1. Mengkoordinasikan eksekusi program dengan desa, OPD lain, LSM, dan <i>stakeholder</i> terkait 2. Menjabarkan dan menerjemahkan kebijakan ke dalam program operasional di tingkat lapangan 3. Memantau dan evaluasi program 4. Keterlibatan masyarakat
	Fasilitator, pemerintah berfungsi menyediakan infrastruktur, sarana, serta bantuan teknis	1. Koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan 2. Koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	1. Penyediaan sarana prasarana pendukung Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) 2. Akses layanan sosial dan penyaluran bantuan 3. Pelaporan dan evaluasi program

Konsep	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
	untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.	3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 4. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha	4. Fasilitas koordinasi dan kemitraan
	Katalisator, pemerintah mempercepat transformasi sosial dan ekonomi melalui intervensi serta inovasi guna mendukung kemajuan dan akselerasi pembangunan.	1. Koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan 2. Koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 4. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha	1. Menentukan langkah dalam membangun sinergitas setiap aktor 2. Inovasi kebijakan 3. Penguatan kelembagaan 4. Intervensi pemerintah

1.10 Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peran krusial dalam suatu studi karena menjadi panduan untuk mendapatkan data yang tepat, terstruktur, dan sesuai dengan isu yang diteliti. Menurut Arikunto (2010), metode penelitian merupakan proses pengumpulan, analisis, serta pengolahan data yang dilakukan secara sistematis dan mengikuti prosedur ilmiah guna menarik kesimpulan.

1.10.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Cresswell (2008), penelitian kualitatif adalah pendekatan eksploratif untuk memahami fenomena utama secara mendalam (Raco, 2010). Pendekatan ini bersifat deskriptif dengan analisis induktif, di mana proses pemaknaan dari sudut pandang subjek menjadi lebih menonjol (Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 2008). Pendekatan deskriptif dimanfaatkan untuk menggambarkan fenomena, peristiwa, atau kejadian yang sedang berlangsung saat ini (Ibrahim, 1998).

1.10.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan sebagai situs terjadinya kasus yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan KB (DINSOSPPKB) Kabupaten Rembang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang karena tempat tersebut merupakan tempat untuk memperoleh sumber informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau entitas yang menjadi sumber informasi utama (Amirin, 1989). Hal ini dapat diartikan sebagai orang atau kelompok yang diharapkan peneliti mampu memahami dan menguraikan kasus yang sedang diteliti.

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* untuk memilih informan utama yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau peran strategis dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang. Menurut Sugiyono (2008) dalam Fuad (2014) teknik *purposive* merupakan informan yang ditentukan oleh peneliti dengan alasan memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian digunakan juga teknik *snowball* untuk menjangkau informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan utama, sehingga informasi yang diperoleh semakin kaya dan mendalam. Menurut Sugiyono (2017) *snowball* merupakan teknik pengambilan sampel yang dimulai dari jumlah kecil, di mana sampel awal diminta merekomendasikan teman atau kenalan lain untuk dijadikan sampel hingga data mencapai titik saturasi. Teknik ini diterapkan untuk meneliti subjek yang sulit ditemukan secara langsung, dengan proses yang berlangsung terus-menerus sampai informasi baru tidak lagi muncul.

Penentuan subjek penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria diantaranya yaitu meliputi pihak-pihak yang secara langsung maupun

tidak langsung terlibat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di kabupaten Rembang. Adapun subjek penelitian ini meliputi:

- 1) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan KB (DINSOSPPKB) Kabupaten Rembang. Subjek ini dipilih karena Kepala Dinas memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sosial, termasuk program-program penanggulangan kemiskinan. Posisi ini memungkinkan Kepala DINSOSPPKB memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi, kebijakan, serta capaian dan kendala dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah.
- 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang. Bappeda berperan dalam penyusunan rencana Pembangunan daerah, termasuk rencana penanggulangan kemiskinan. Kepala Bappeda dapat memberikan informasi terkait dengan arah kebijakan Pembangunan jangka menengah dan panjang, integrasi program-program lintas OPD, dan sinergi antar *stakeholder* dalam menurunkan angka kemiskinan.
- 3) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial DINSOSPPKB Kabupaten Rembang, Bidang ini menangani menangani kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, dan korban kekerasan serta kelompok yang rentan terhadap kemiskinan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dapat memberikan informasi

terkait pelaksanaan teknis dan intervensi rehabilitasi sosial dalam mendukung penurunan kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan.

- 4) Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Pemberdayaan Sosial DINSOSPPKB Kabupaten Rembang. Bidang ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bantuan sosial dan perlindungan sosial.
- 5) Kepala Sub-Koordinator Pemberdayaan Sosial DINSOSPPKB Kabupaten Rembang. Sub-Koordinator ini berada dibawah Bidang Perlindungan, Jaminan Pemberdayaan Sosial dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan keluarga miskin, menangani data kemiskinan, koordinasi intervensi kemiskinan ekstrem, dan mengelola bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan layanan rujukan terpadu (SLRT).
- 6) Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang. Bidang ini berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Narasumber ini dipilih karena dapat memberikan informasi dari aspek koordinatif perangkat daerah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pengawasannya di lapangan.

- 7) Pendamping Sosial. Informan ini dipilih karena menangani langsung program bantuan dari pemerintah ke masyarakat.
- 8) Keluarga Penerima Manfaat. Narasumber ini dipilih karena merupakan kelompok yang terdampak langsung terhadap peran pemerintah. Narasumber ini dipilih untuk mengetahui efektivitas program pemerintah dari sisi manfaat, serta menggali pengalaman langsung dalam mengakses bantuan dan tantangan yang dihadapi.

Tabel 1.6

Pemilihan Informan

No	Informan	Jumlah	Teknik	Alasan
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan KB (DINSOSPPKB) Kabupaten Rembang	1	Teknik <i>Purposive</i>	Mengetahui gambaran menyeluruh terkait strategi, kebijakan, serta capaian dan kendala dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang	1	Teknik <i>Purposive</i>	Dapat menyediakan masukan mengenai arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang, integrasi program antar OPD, serta sinergi antar pemangku kepentingan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial DINSOSPPKB Kabupaten Rembang	1	Teknik <i>Purposive</i>	Orang yang mengetahui pelaksanaan teknis dan intervensi rehabilitasi sosial dalam mendukung penurunan kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan.
4.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Pemberdayaan Sosial	1	Teknik <i>Purposive</i>	Orang yang mengetahui pelaksanaan teknis dan operasional pelaksanaan

	DINSOSPPKB Kabupaten Rembang.			program bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem
5.	Kepala Sub-Koordinator Pemberdayaan Sosial DINSOSPPKB Kabupaten Rembang	1	Teknik <i>Purposive</i>	Pelaksana teknis penanggulangan kemiskinan ekstrem, penyalur bantuan PKH dan DTKS
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang	1	Teknik <i>Purposive</i>	Mengetahui aspek koordinatif perangkat daerah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pengawasannya di lapangan.
7.	Pendamping PKH	1	<i>Purposive</i>	Orang yang bersentuhan langsung dengan keluarga penerima manfaat
8.	Keluarga Penerima Manfaat		Teknik <i>Snowball</i>	Masyarakat penerima manfaat

1.10.4 Sumber Data

Sumber data merupakan asal muasal dari diperolehnya data yang nantinya digunakan untuk kepentingan penelitian ini. Arikunto menjelaskan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh dalam suatu penelitian (Arikunto, 2002). Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan kepada yang mengumpulkan data tersebut (Sugiyono, 2008). Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dengan informan dan narasumber, serta dari observasi langsung terhadap fenomena dan permasalahan terkait. Data primer tersebut mencakup seluruh komponen yang

terlibat dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang.

2. Data Sekunder

Umar (2013) mengartikan data sekunder sebagai data primer yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Menurut Kuncoro (2009), data sekunder berasal dari pengumpulan dan penemuan oleh pihak lain, bukan peneliti sendiri. Berdasarkan pandangan ahli tersebut, data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui literatur, buku, jurnal, serta studi-studi sebelumnya yang relevan dengan kemiskinan ekstrem.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pada teknik ini terjadi komunikasi dari yang mewawancarai dan yang diwawancarai dengan interaksi secara langsung (Yusuf, 2014). Fungsi dari teknik ini sebagai pencatatan pendapat, apa yang dirasakan, serta berbagai rasa lainnya berhubungan pada perorangan pada suatu kelompok atau instansi. Melalui proses teknik ini, diperoleh data yang lebih luas lagi.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari catatan, surat, hasil rapat, arsip foto, jurnal, artikel, laporan, peraturan, maupun sumber serupa. Dokumen tersebut dimanfaatkan

untuk mengungkap informasi dari periode masa lalu. Menurut Arikunto (2010:274), dokumentasi ialah upaya mendapatkan data terkait variable melalui catatan, transkrip, surat kabar, buku, majalah, agenda, notulen rapat, dan sebagainya.

3. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung dari lapangan (Semiawan, 2010). Pada dasarnya, observasi merupakan proses pengamatan menggunakan Indera penglihatan, pendengaran, dan lainnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan melalui pemeriksaan literatur terkait, seperti buku, artikel, jurnal, dokumentasi regulasi, laporan resmi pemerintah, serta riset sebelumnya yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Menurut Zed (2004: 3), Studi pustaka adalah kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data melalui penelaahan terhadap berbagai literatur atau bacaan yang relevan dengan masalah yang dikaji.

1.10.6 Teknik Analisis Data

Miles, Huberman, dan Saldana (2014) berpendapat bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif mencakup tiga tahapan utama yaitu sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, serta transformasi data mentah dari lapangan (seperti catatan observasi, dokumentasi, hasil wawancara, dan lainnya) menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Proses kondensasi ini dimulai sejak tahap pengumpulan data awal dan dilakukan secara berkelanjutan hingga penelitian selesai. Tujuannya yaitu untuk mengelola data melimpah, menemukan pola awal, dan mengidentifikasi fokus analisis.

Kondensasi data dapat dimaknai sebagai kegiatan menganalisis data kualitatif dengan cara menyederhanakan data yang telah diperoleh dari lapangan dengan mempertajam, mengelompokkan, pengarahannya, dan pembuangan data yang tidak dibutuhkan dengan tujuan agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut (Sugiyono, 2015).

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (1994) tahapan setelah kondensasi data adalah penyajian data. Penyajian data didefinisikan sebagai pengorganisasian informasi secara terstruktur untuk

memudahkan penarikan makna. Bentuk penyajiannya mencakup narasi, matriks, grafik, atau jaringan antar-kategori, yang membantu peneliti mengidentifikasi pola serta keterkaitan data.

Di dalam menyajikan data harus dilakukan dengan tepat dan sistematis sehingga tidak membingungkan pembaca. Penyajian data berupa kumpulan data yang telah berbentuk informasi dengan susunan yang sistematis dan dapat diambil kesimpulan. Adapun data penelitian kualitatif berbentuk teks dengan disajikan secara naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah kegiatan mengumpulkan data telah selesai dilanjutkan dengan mengetahui data-data yang dibutuhkan, pencatatan aturan-aturan, hubungan-hubungan dari data, sebab akibat dan yang lainnya. Tahapan terakhir dalam proses ini adalah peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan data.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap sepanjang proses penelitian dengan taksonomi penelitian kualitatif. Taksonomi penelitian kualitatif dalam penarikan kesimpulan dapat dipahami sebagai pengorganisasian konsep dan kategori secara sistematis yang muncul dari proses reduksi dan penyajian data untuk menghasilkan pola makna yang utuh. Taksonomi ini tersusun melalui langkah-langkah pengelompokan data ke dalam tema,

subtema, dan hubungan antarkategori, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi struktur konseptual yang konsisten sebelum menarik kesimpulan akhir yang bersifat empiris dan kontekstual.

1.10.7 Kualitas Data

Kualitas data menurut Creswell (2018) diperoleh dari triangulasi data yang mana triangulasi data ini dimaksudkan untuk menambah validitas dari suatu data yang telah diperoleh. Triangulasi data merupakan teknik untuk meningkatkan keabsahan penelitian melalui penggabungan berbagai sumber data, metode, teori, atau peneliti.

Menurut Sugiyono (2008), triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang mengintegrasikan berbagai data dan sumber yang tersedia. Tujuannya untuk menverifikasi kredibilitas data melalui beragam teknik pengumpulan dan sumber informasi. Wijaya (2018) menyatakan bahwa triangulasi data melibatkan pemeriksaan data dari multi sumber, metode, dan waktu. Bentuk triangulasi data mencakup triangulasi sumber, triangulasi metode pengumpulan data, serta triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas suatu data dengan membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari berbagai narasumber dengan karakteristik yang berbeda, baik dari status sosial, maupun peran. Adapun sumber data yang

digunakan yaitu hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan cara menguji keabsahan data melalui pemeriksaan dengan metode atau teknik yang berbeda. Contohnya, data dari observasi diverifikasi menggunakan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan teknik validasi data dengan mengumpulkan dan membandingkan informasi dari fenomena yang sama pada titik waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan akurasi data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi sumber data dengan cara membandingkan temuan dari wawancara langsung dengan narasumber, kandungan dokumen kebijakan terkait, serta memanfaatkan beragam sumber informasi primer dan sekunder sebagai bahan pendukung utama dalam proses verifikasi.